

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kecenderungan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan

Menurut Gray et al., (1995) teori kecenderungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

a. Decision Usefulness Studies

Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang *moderately important*.

b. Economic Theory Studies

Pihak manajemen melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik.

c. Social and Political Theory Studies Studi di bidang ini menggunakan teori *stakeholders*, teori legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik.

- Teori *Stakeholder*

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik dengan sebatas pada indikator ekonomi namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada

ranah sosial kemasyarakatan dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial, sehingga muncul istilah tanggung jawab sosial.

- Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka.

2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan (*The World Business Council for Sustainable Development – WBCSD, 2005*). Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan tanggung jawab ke luar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang (Susanto dalam Agoes, 2011).

Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu: mencari keuntungan (*profit*) bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat (*people*) dan memelihara kelestarian alam/bumi

(*planet*) (Elkington dalam Agoes, 2011). Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan terintegrasi dengan kelangsungan kegiatan operasi perusahaan, tidak hanya memperhatikan kepentingan *shareholders* namun juga memperhatikan kepentingan *stakeholders* dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagipara pemangku kepentingan. Adapun tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan adalah sebagai berikut (Rosmasita, 2007):

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

2.2.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan dapat diartikan sebagai pemberian informasi bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Terdapat dua jenis informasi yang dimuat di dalam *annual report*, yaitu yang pertama adalah laporan tahunan dengan pengungkapan wajib yaitu pengungkapan informasi yang wajib diberitahukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bapepam No.: Kep-38/PM/1996 17 Januari 1996. Jenis yang kedua adalah laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan informasi selain pengungkapan wajib yang diberikan dengan sukarela oleh perusahaan para pemakai (Yulianto dan Chariri, 2003). Salah satu bagian dari

pengungkapan sukarela yang diungkapkan di dalam *annual report* atau *sustainability report* yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan dalam kurun waktu satu tahun periode. Pengungkapan tanggung jawab sosial ini juga dapat memberikan gambaran atas kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan mengenai tanggung jawab sosial yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki tata cara manajerial yang berbeda-beda.

Aspek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yaitu aspek lingkungan hidup (penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki), praktik ketenagakerjaan (kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan), pengembangan sosial dan kemasyarakatan (penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya) dan tanggung jawab produk (kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen).

2.3 Struktur Kepemilikan Saham di dalam Perusahaan

Struktur kepemilikan saham di dalam perusahaan dikelompokkan atas proporsi saham yang dimiliki. Kepemilikan saham dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga katagori, yaitu:

a. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Rustiarini, 2011). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Machmud dan Djakman, 2008). Salah satu cara yang dipilih perusahaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan adalah dengan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing, yaitu: perusahaan asing memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal (operasional perusahaan) dan didindikasikan perusahaan berbasis asing memiliki permintaan pengungkapan informasi yang lebih luas dari *stakeholder* dan juga memiliki standar kinerja tinggi dan tata kelola perusahaan yang baik.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2011). Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan dan

pendekatan ketidakseimbangan informasi. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal (Itturiaga dan Sanz, 1998).

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dana perwalian serta institusi lainnya (Soliman et al., 2012). Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen serta pengawasan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini, institusional dibagi menjadi dua, yaitu institusional BUMN dan institusional Non-BUMN. Pada institusi BUMN, program CSR diwujudkan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan SK No. 236/MBU/2003. PKBL merupakan kewajiban perusahaan milik Negara dalam bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya untuk bidang sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat baik kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) maupun program kemitraan di bidang ekonomi (Rakhmawati dan Syafruddin, 2011).

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Soliman et al., (2012) pada perusahaan di Mesir mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh institusional dan pihak asing berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mahoney et al., (2007) tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan saham institusional perusahaan di Indonesia, menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Investor institusional tidak menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tujuan investasi, mereka lebih fokus pada keuntungan yang dihasilkan dalam jangka pendek.

Rustiani (2011) melakukan penelitian yang sama pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan hasil kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan namun kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Eriandani (2013) mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Politon dan Rustiyaningsih (2013) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur go publik di Indonesia dan mendapatkan hasil bahwa *size*, profil, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara

itu, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati dan Syafruddin (2011) mengindikasikan bahwa tipe industri, ukuran perusahaan dan perusahaan BUMN berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun hasil lain yang juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriandani (2013) yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

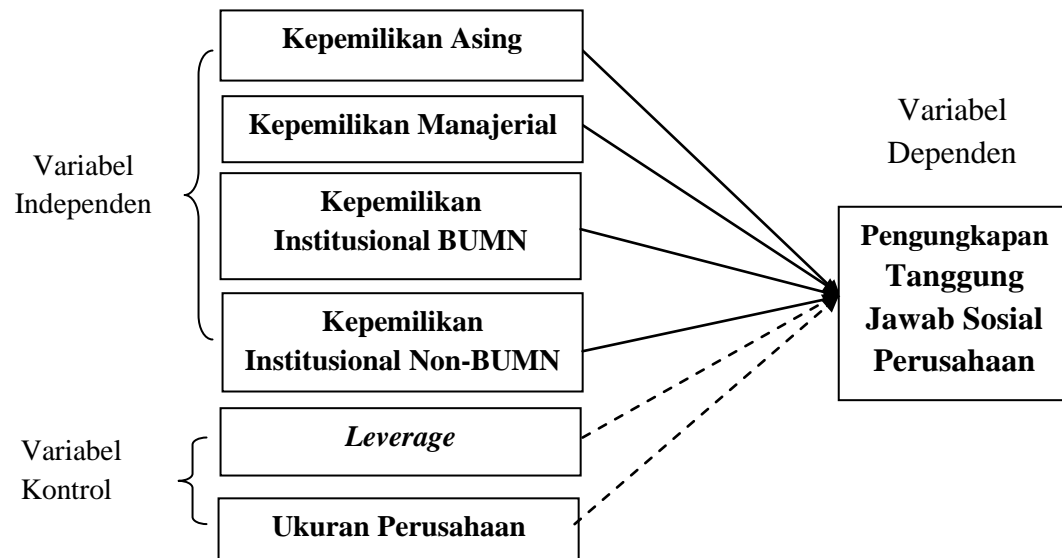
2.5 Model Penelitian

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, memiliki kaitan erat dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk hidup tidak akan pernah lepas dari kebutuhan akan sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam, khususnya yang terbatas, harus tetap dijaga kelestariannya agar tetap dapat memberikan manfaat untuk generasi yang akan datang. Peraturan pemerintah untuk Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial yaitu Nomor 47 Tahun 2012. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bagian penting di dalam perusahaan. Program ini membantu perusahaan untuk dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Jika perusahaan memiliki *image* baik, maka akan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari *stakeholder* agar dapat terus eksis dalam menjalankan perusahaan. Selain itu, program ini juga membantu pemerintah untuk mengawasi dan membatasi

kegiatan operasional perusahaan, terutama yang terdapat kaitannya dengan sumber daya alam.

Di dalam suatu perusahaan, terdapat persentase kepemilikan saham yang berbeda-beda yang akan menyebabkan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Dalam hal ini, keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah mengenai pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini, membagi kepemilikan saham menjadi tiga, yaitu kepemilikan asing, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dibagi menjadi dua, yaitu institusional BUMN dan institusional Non-BUMN. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan yang diduga ikut berpengaruh di dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, diindikasikan perusahaan akan melanggar perjanjian hutang dan menghilangkan kepercayaan dari *debtholder* (Nur dan Priantinah, 2012). Perusahaan akan cenderung berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki biaya keagenan yang juga besar, maka perusahaan akan cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi untuk mengurangi biaya keagenan. Salah satu informasi yang dapat diungkapkan secara luas yaitu tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian di atas maka, model penelitian yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.6 Hipotesis

2.6.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kepemilikan Asing

Perusahaan berbasis asing memiliki teknologi yang cukup, kemampuan karyawan yang baik serta jaringan informasi yang luas, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengungkapan secara luas. Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memperlihatkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, apabila perusahaan di Indonesia memiliki kontrak dengan pihak asing baik kepemilikan dan *trade*, maka perusahaan akan lebih mendapatkan dukungan dalam rangka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sesuai dengan teori *stakeholder*, semakin banyak dan kuat posisi *stakeholder*, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholder*. Hal tersebut diwujudkan dengan cara melakukan aktivitas pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungannya atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Soliman

et al., (2012) pada perusahaan di Mesir dan Rustiarini (2011) pada perusahaan manufaktur di Indonesia mengindikasikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif pada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Politon dan Rustiyaningsih (2013) yang juga dilakukan pada perusahaan manufaktur mengindikasikan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hal ini diindikasikan terjadi karena perbedaan tahun penelitian sehingga terdapat perbedaan kondisi internal maupun eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi acuan dalam penelitian juga berbeda.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan asing dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini memprediksi adanya pengaruh positif kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H1: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

2.6.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial

Jumlah kepemilikan manajerial yang besar akan menyebabkan manajemen ikut merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka juga menjadi pemilik perusahaan. Mereka akan cenderung mengambil keputusan dengan tujuan memaksimalkan *shareholder value*. Jika tanggung jawab sosial dapat meningkatkan nilai perusahaan, kepemilikan terhadap saham akan memberikan insentif pada manajer untuk melakukan aktivitas tanggung jawab

sosial perusahaan. Aktivitas tersebut memang dapat mempengaruhi negatif profitabilitas jangka pendek perusahaan, tetapi manajer akan tetap melakukan tanggung jawab sosial perusahaan karena akan meningkatkan *image* perusahaan dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Beberapa penelitian telah membuktikan hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan manajemen, namun dengan hasil yang berbeda-beda. Uwuigbe (2011) menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Nigeria. Di Indonesia, hal yang sama dibuktikan oleh Rosmasita (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Namun ketidakkonsistenan hasil ditunjukkan oleh penelitian Susanti dan Raharjo (2013) pada perusahaan *cosmetics and household* yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini didindikasikan karena jumlah kepemilikan saham manajerial yang relatif berbeda di setiap sektor perusahaan.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini memprediksi adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H2: *Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.*

2.6.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kepemilikan Institusional

Investor institusional dapat mendorong besarnya aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan dengan dua cara, yaitu melalui keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dan dengan hanya berinvestasi pada perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (Li et al., 2006). Investor institusional akan mendorong kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dengan maksud meningkatkan kinerja *financial* jangka panjang, menjaga reputasi, serta mendapatkan legitimasi sosial. Pada umumnya investor institusional Non-BUMN lebih memilih untuk terlibat dalam menentukan rencana strategis perusahaan tempatnya berinvestasi daripada memindahkan investasinya ke perusahaan lain. Investor Non-BUMN juga banyak tertarik untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai perusahaan agar mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional BUMN biasanya menguasai sebagian besar saham sehingga dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara luas. Selain itu, institusional BUMN juga merupakan lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga perusahaan akan melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara luas. Penelitian yang dilakukan oleh Soliman et al., (2012) pada perusahaan di Mesir serta Politon dan Rustiyaningsih (2013) pada perusahaan manufaktur di Indonesia mengindikasikan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Namun pada penelitian Mahoney et al., (2007), Rustiarini (2011) dan Eriandani (2013) yang dilakukan di Indonesia mengindikasikan bahwa kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati dan Syafruddin (2011) mengindikasikan bahwa kepemilikan BUMN berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan institusional BUMN dan kepemilikan institusional Non-BUMN dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini memprediksi adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H3: Kepemilikan institusional BUMN berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H4: Kepemilikan institusional Non-BUMN berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.